PILIHAN RASIONAL KIAI DAN DESAIN PENDIDIKAN TOLERANSI DI PONDOK PESANTREN TEBUIRENG DAN NURUL JADID

Mursyid
Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Indonesia
E-mail: mursyid63@gmail.com

Abstract: This article discusses the role of kyai and the learning design used in educating tolerance in two *pesantren*s, namely Pesantren Tebuireng of Jombang and Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. The two *pesantren*s educate their students to internalize and actualize tolerant value and attitude. However, the value of tolerance is not taught formally like other subjects, but rather developed through informal learning and examplary model by the kyais in both *pesantren*s. As the kyais in both *pesantren*s have inclusive views and tolerant attitudes in the context of pluralistic society, the students learn from their tolerant views and attitudes, and adopt this value in their daily activities. Using Coleman's rational choice theory, it can be argued that the kyais of both pesantrens have consciously adopted the value of tolerance as one of the important instructional values. Therefore, it can be concluded that pesantren is the place of seeding the values of tolerance, while the learning design used by pesantrens can be called "tolerance exhibition model".

Keywords: Kyai; educating tolerance; Pesantren Tebuireng of Jombang; Pesantren Nurul Jadid Probolinggo.

Pendahuluan

Diakui atau tidak kontestasi pendidikan toleran dan multikultural di lembaga pendidikan umum ataupun keagamaan di Indonesia masih berada pada ruang ambigu. Pada satu sisi, khususnya di lembaga pendidikan formal, konsep pendidikan toleransi didesain melalui kurikulum terstruktur dan dipelajarkan berdasarkan pada model perencanaan dan pengimplementasian sistematis. Meskipun, pada wujud *output*-nya masih banyak peserta didik yang tidak memiliki

kesadaran toleransi pada level sewajarnya.[1] Di sisi yang lain, terdapat lembaga pendidikan informal atau non-formal yang tidak memiliki model kurikulum terstruktur, namun mampu membentuk karakter toleran pada peserta didiknya.[2] Ada juga lembaga pendidikan yang dijadikan alat indoktrinasi sikap toleran dan intoleran terhadap orang yang memiliki perbedaan pandangan, khususnya dalam bidang sikap keberagamaan.[3]

---

[1] Wujud konkret pendidikan toleran dan multikultural, menurut HAR Tilaar, terlihat dalam desain pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*). Dalam konteks ini, Tilaar menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus didesain untuk menumbuhkan sikap sadar etnisitas, keberagaman agama, dan budaya yang berkembang di Indonesia. Lihat HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan* (Bandung, Rinneka Cipta, 2003), 87. Kondisi sebaliknya, penelitian Maarif Institut dan beberapa kontributornya menegaskan bahwa di lembaga pendidikan formal Pembelajaran PAI cenderung dijadikan alat indoktrinasi paham radikal di lembaga pendidikan. Lihat Ahmad Baedowi et.al., "Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan Aksi", *Jurnal Ma'arif Institute*, Vol. 8, No 1 (2013). Dua kontestasi inilah yang kemudian menjadikan pembentukan karakter toleran di lembaga pendidikan formal tidak dapat berjalan maksimal. Pertarungan dua kepentingan yang selalu menghiasi sistem pendidikan di Indonesia. Tim Penyusun, *Toleransi dalam Pasungan: Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional* (Jakarta: SETARA Institute, 2008).

[2] Fenomena kedua bisa dilihat bagaimana pondok pesantren dan lembaga pendidikan informal lainnya, mampu menunjukkan dirinya sebagai lembaga toleran, tanpa harus menghadirkan format atau desain kurikulum toleransi secara sistematis. Yang dilakukan, umumnya, berasal dari proses pembiasaan dan pencontohan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang ada di dalam lembaga tersebut. Lihat Abdurrahman Mas'ud, "Memahami Agama Damai Dunia Pesantren", Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), xvii.

[3] Proses indoktrinasi pemahaman toleran di pesantren atau intoleran terhadap keragaman pandangan bisa diidentikkan dengan konsepsi *transnational-linkage* pendidikan Islam dan kepentingan global. Tidak jarang akhir-akhir ini lembaga pendidikan Islam melakukan proses amalgamatif antara agama yang satu dengan komunitas agama yang lain. Adapula penelitian indonesianis yang menyebut pendidikan Islam dijadikan alat untuk mengindoktrinasi paham intoleran. Pola kajian kedua ini, lebih banyak dibandingkan, yang sebelumnya. Penulis bisa menyebutkan misalnya penelitian. Charlene Tan, *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia* (New York: Routledge, 2011). Robert W. Hefner, "Islamic School, Sosial Movement, and Democracy in Indonesia", dalam Robert W. Hefner (ed.), *Making Modern Islam Politic of Education in South Asia* (USA: Hawai University Press, 2009). Martin Van Bruisennen, "Tradisional and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Fasrish A Noor (ed.), *Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 217-218.

Oleh karena itulah, kontestasi diskursif untuk mencari format ideal pendidikan toleransi ini tidak bisa berhenti begitu saja agar pendidikan toleransi pada pemaknaan yang lebih luas tidak mencari ruang dan tempatnya sendiri. Akhirnya, pendidikan toleransi hanya diperuntukkan untuk kalangan mayoritas, diletakkan pada bingkai kepentingan politik, atau hanya pemanis identitas kemajemukan yang dibentuk oleh *founding father* Indonesia (Bhinneka Tunggal Ika). Pendidikan toleransi, idealnya, harus berwujud pada nalar berpikir, sikap individu, hingga pada norma sosial masyarakat plural. Greg Fealy dan Anthony Bubalo pun mewanti-wanti agar konsepsi ideologi kelembagaan dunia pendidikan sebagai pertarungan yang wajib diantisipasi untuk menjaga identitas bangsa Indonesia.[4]

Dalam analisa Sumartana menyebutkan bahwa kegagalan pendidikan dalam menumbuhkan kesadaran toleransi keberagamaan yang disebabkan oleh empat faktor: *Pertama*, pendidikan lebih menekankan pada proses transfer ilmu agama ketimbang proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral pada anak didik; *Kedua*, sikap bahwa pendidikan agama hanya sekadar sebagai pelengkap dari keseluruhan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan IPTEK; *Ketiga*, penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan umat beragama, seperti asas persamaan dalam hidup, rasa cinta, kasih sayang, persaudaraan, saling menolong, cinta damai dan toleransi, kurang mendapat porsi dalam pendidikan Islam; dan *Keempat*, kurang ada perhatian untuk mempelajari agama-agama lain dan pluralitas paham keagamaan dalam Islam.[5]

Berdasar pada asumsi ambiguitas proses dan problem yang sering dihadapi hingga pada aspek ideologis kelembagaan dalam pendidikan toleransi tersebut, maka kertas kerja ini diharapkan bisa menambah khazanah baru pengembangan dan strategi penyampaian pendidikan toleransi yang bersumber dari dua pondok pesantren toleran; di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton.[6] Dalam artikel ini penulis menggunakan dua kerangka

[4] Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah*, terj, Akh. Muzakki (Bandung: Mizan, 2007), 78.

[5] Sumartana at al. *Pluralisme*, *Konflik*, *dan Pendidikan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 239-240.

[6] Dalam konteks penelitian di PP. Nurul Jadid, posisi peneliti adalah sebagai *participant as observer* yang menandakan bahwa peneliti merupakan *insider* yang ingin mendeskripsikan kondisi objektif berdasarkan pada kode etik peneliti. Untuk lebih

teori sosial, yakni *rational choice theory* James Colemen[7] dan integrasi mikro dan makro George Ritzer.[8]

Konsepsi Umum Pendidikan dan Model Pengembangan Toleransi

Pada dasarnya sikap toleran dibentuk oleh tiga aspek penting: *pertama*, paradigma individual dalam memahami pluralitas sosial, agama, dan kebudayaan yang menghampiri kehidupan mereka. *Kedua*, wujud kesadaran kuat bahwa sikap toleransi merupakan manifestasi dari keyakinan paradigmatik tersebut. *Ketiga*, tawaran desain pembentukan karakter toleran dalam lembaga pendidikan Islam. Anggapan-anggapan ini didasarkan pada *frame* teoretik yang sudah digagas oleh para peneliti sebelumnya. Dalam hal perumusan paradigma konteks kajian keislaman, terdapat tiga tipologi penting, antara lain: *pertama*, cara pandang esoteris *vis a vis* eksoteris. *Kedua*, cara pandang inklusivisme *vis a vis* eksklusivisme. *Ketiga*, cara pandang yang pluralis.

---

lengkapnya. Lihat Kim Knott, "Insider and Outsider Perspective" dalam Hinnels *Routledge Companion of Religious Studies* (New York: Routledge, 2001), 283.

[7] Ada tiga fenomena makro yang menarik dari diagnosa Coleman melalui teori pilihan rasional *Pertama*, Perilaku kolektif. Perilaku kolektif bermakna sebuah tindakan pragmatis dan fungsionalis yang tidak didasarkan pada pilihan rasional. *Kedua*, Norma. Adapun norma yang dimaksud Coleman adalah sistem nilai pengikat individu. *Ketiga*, Aktor Korporat. Aktor koorporat bisa diartikan sebagai *staffing line* perilaku kolektif dan penyangga norma yang sudah disepakati. Aktor korporat berarti pula sebagai *agent* penginternalisasi nilai-nilai tindakan aktor utama dalam interaksi social. Lihat James Coleman, *Foundation of Social Theory* (Cambridge: Biknap Press of Harvard University Press: 1990), 13.

[8] Ritzer dalam analisis sosialnya, dimulai dengan kontinum mikro-makro yang bergerak dari pemikiran dan tindakan individual menuju sistem dunia, kemudian ditambahkan kontinum objektif-subjektif yang bergerak dari fenomena material (tindakan individual dan struktur birokrasi) ke fenomena nonmaterial (kesadaran, norma, dan nilai). Menurut Ritzer, seluruh fenomena sosial mikro dan makro adalah fenomena objektif atau subjektif, sehingga dalam analisis sosial terdapat empat tingkat utama, dan dealektika dari keempat tingkat analisis ini harus mendapat perhatian dalam studi sosiologi. Tingkat makro objektif, meliputi relaitas material berskala luas seperti masyarakat, birokrasi, dan teknologi. Tingkat makro subjektif, meliputi fenomena nonmaterial berskala luas seperti norma dan nilai. Di tingkat mikro objektif, meliputi kesatuan objektif berskala kecil seperti pola tindakan dan interaksi. Sedangkan mikro subjektif, meliputi proses mental berskala kecil yang melalui proses tersebut individu membangun realitas sosial. Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, terj, Alimandan (Jakarta: Kencana, 2010), 357.

Kata esoterisme sering juga diartikan sebagai cara pandang subtantif dalam melihat pluralitas agama. Media Zainul Bahri, mengutip beberapa pandangan para tokoh sufi, mendefinisikan esoterisme sebagai wujud pertemuan agama-agama yang ada di alam semesta. Esoterisme pun bermakna agama-agama bermuara dari Dzat yang Satu (*al-H{aqq*). Esoterisme mengindikasikan beberapa hal penting dari sisi corak pandangannya; kesatuan esensi, kesatuan tujuan, kesatuan asal sharî'ah, kesatuan transenden, dan kesatuan pesan.[9] Husein Muhammad menambahkan makna esoterisme adalah paradigma keagamaan yang subtantif. Semua agama dalam wujud yang berbeda nama, *habitus* dan ritusnya memiliki kesamaan tujuan menuju Tuhan yang satu.[10] Begitu halnya Seyyed Hossein Nasr menyimpulkan semua agama dari sisi yang tampak memang tidak bisa disatukan, karena memiliki perbedaan mendasar dari sisi praktik. Perihal yang sangat berbeda, apabila agama dipandang dari sisi dalam, maka semua agama akan menumpuk banyak kesamaan dibandingkan menumpuk perbedaan.[11]

Adapun kata eksoteris merupakan lawan dari paradigma esoterisme. Karakteristik pemikiran ini, secara kebahasaan, bermakna bagian luar. Dalam konteks pemahaman pluralitas agama dan paham keagamaan, paradigma ini terinstrumentasi sebagai cara pandang bernilai formal, dogmatik, ritual, dan etik.[12] Eksoterisme bisa juga dimaknai, sebagai cara pandang terhadap perilaku pemeluk agama yang mengejawantah kepermukaan, apakah itu berbentuk peribadatan, ritualitas, dan bidang-bidang lainnya, yang dapat dilihat secara kasat mata. Di pihak yang lain, eksoterisme lebih cenderung menonjolkan perbedaan-perbedaan antaragama dibandingkan mencari kerangka titik temu agama.

Selanjutnya adalah cara pandang inklusivisme dan eksklusivisme. Sama halnya dengan esoterisme, inklusivisme memiliki polarisasi konsep sebagaimana berikut: setiap agama memiliki dimensi kebenarannya sendiri sesuai ajaran masing-masing, ada kesamaan (*common word/platform*) di dalam setiap agama, mendahulukan dialog untuk menyelesaikan persoalan, dan seringkali memilih jalan damai,

[9] Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama Pandangan Sufistik Ibnu 'Arabi*, *Rumi*, *dan al-Jili* (Jakarta: Mizan Publika, 2011), 17-18.
[10] Ibid., 21-22.
[11] Ibid., 24.
[12] Harold Coward, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Bosco Carvalo (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 164.

dibandingkan kekerasan.[13] Sedangkan asumsi dasar ekslusivisme hampir sama dengan cara pandang eksoterik. Karakter cara pandang ini adalah kebenaran suatu agama hanya terdapat pada satu agama itu sendiri. Cara pandang demikian tidak selalu mengandung kesalahan. Sebuah agama, pada sisi tertentu, memang mengajarkan dan menganjurkan pemeluk agamanya untuk memiliki komitmen yang kuat akan keyakinannya. Misalnya dalam Islam, klaim Islam sebagai agama yang paling benar tertera secara gamblang di dalam kitab suci al-Qur'ân.[14] Namun, cenderung memiliki ekses negatif. Misalnya, adanya proses pemaksaan untuk menyeragamkan keyakinan orang yang berbeda. Ia tidak menerima kebenaran agama yang lain kendati hal itu bukan persoalan dan doktrin keagamaan. Eksklusivisme berkecenderungan pada sikap anarkistis.[15]

Cara pandang pluralis bisa dikatakan paradigma yang paling populer. Pemahaman plural berarti mengakui dan memahami eksistensi perbedaan di alam semesta ini, apakah itu dalam ranah agama, budaya, dan adat, merupakan kehendak Tuhan yang maha berkehendak. Budhy Munawar-Rahman menyebut pluralisme adalah sistem nilai yang menghargai pluralitas. Namun, pluralisme bukanlah sikap sinkretis, melainkan sikap penghargaan tertinggi terhadap perbedaan yang terjadi.[16] Dawam Rahardjo menganggap pluralisme adalah paham yang bertolak dari pandangan masyarakat bahwa yang plural itu memang memiliki perbedaan; tidak perlu disamakan.[17] Bagi seorang Zuhairi Misrawi, pluralisme memiliki tiga poin penting, antara lain: meniscayakan keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaan, melampui sikap toleran, meneguhkan komitmen bersama untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan atau beragama.[18]

Tiga cara pandang ini hingga sekarang masih tetap mewarnai pola dan corak keislaman di Indonesia. Representasi dari beberapa cara pandang ini secara antropologis bisa terlihat jelas, mulai dari

[13] Abdulaziz Sachedina, *Beda Tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non Islam*, terj. Satrio Wahono (Jakarta: Serambi, 2004), 90.
[14] Lihat Q.S al-Mâidah.
[15] Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, terj Nurasiah Fakih Sutan Harahap (Bandung: Mizan, 2003), 215.
[16] Budhy Munawar-Rahman, *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Peradaban Baru Islam Indonesia* (Jakarta: LSAF-Paramadina, 2010), 85.
[17] M. Dawam Raharjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan* (Jakarta: Kencana, 2010), 232.
[18] Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'ân Kitab Toleransi*, *Inklusivisme*, *Pluralisme*, *dan Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007), 197-198.

kelompok esoterik-inklusif yang berwujud *Sufism and Sufi Order* dalam kehidupan sehari-hari atau kelompok-kelompok Islam fundamental, salafis, radikal, dan anarkistis sebagai representasi dari cara pandang eksoteris-eksklusif. Atau, kelompok pluralis yang tidak banyak membincangkan perbedaan-perbedaan paham keberagamaan dan keagamaan dalam proses interaksi sosial. Kelompok ini pada konteks Islam-Indonesia terepresentasikan oleh kelompok mayoritas yang diam dan lebih fokus terhadap persoalan kemanusiaan, ekonomi, dan pemberdayaan umat Islam.

Dari asumsi di atas, sikap toleran sesungguhnya hanya bisa disematkan dan diatribusikan kepada kelompok yang memiliki pandangan-pandangan tanpa batasan pembedaan akan nilai kemajemukan. Nurcholish Madjid memberi pemaknaan terhadap *samh}ah* dengan "semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan dan tidak membelenggu jiwa".[19] Toleransi merupakan salah satu kekuatan yang harus dijadikan komitmen bersama untuk menciptakan saling memahami dan saling menghargai antara yang satu dengan lainnya secara tulus dan damai, karena dengan toleransi seseorang bisa menahan diri dari tindakan yang tidak menyenangkan pihak lain. Toleransi merupakan kemampuan seseorang dalam menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan,[20] sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian dalam keragaman.

Toleransi beragama memiliki makna membiarkan, menghargai, dan membolehkan mereka yang berbeda agama, keyakinan, dan paham keagamaan untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat.[21] Toleransi beragama tidak bermakna membuang identitas keagamaan dalam diri umat beragama, untuk kemudian melebur dalam keyakinan dan ritual bersama. Toleransi tidak pula bermakna pembenaran terhadap keyakinan orang lain yang beda keyakinan, sehingga berpotensi terjadinya kontoversi agama. Kelapangan menerima perbedaan sebagai wujud kemerdekaan seseorang dalam menentukan pilihan jalan hidupnya merupakan esensi toleransi beragama. Toleransi beragama tidak ada hubungannya dengan relativitas kebenaran,

[19] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 155.
[20] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1998), 41.
[21] Ali Maksum, *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), 155.

melepaskan iman, menghindari kepastian, dan berkehendak bebas, atau meleburkan yang benar dan salah.[22]

Nilai toleransi terkait erat dengan kerendahan dan kemurahan hati, keramahan, dan kesopanan dalam menghargai orang lain. Seseorang yang berjiwa toleran akan selalu melakukan *self-criticism* (kritik diri) atas keterbatasan pemahaman atau pengetahuan dirinya,[23] sehingga ada kesiapan untuk mendialogkan apa yang menjadi perbedaan, baik dalam mencari titik temu maupun dalam merumuskan alternatif kerangka kebersamaan dalam perbedaan. Dengan kesadaran atas keterbatasan tersebut, seseorang yang toleran akan terhindar dari kesombongan diri yang memandang salah segala hal yang ada di luar pengetahuannya dan hal-hal yang membedainya. Pengembangan nilai toleransi terkait erat dengan peningkatan kemampuan diri melakukan kontrol emosi dalam menyikapi perbedaan. Mencintai dan membenci merupakan sifat dasar manusia yang terkait dengan emosi diri. Manusia cenderung mencintai sesuatu yang cocok bagi dirinya dan membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Kontrol emosi dalam menghindarkan diri dari kemarahan atas kebencian pada sesuatu yang tidak sesuai menjadi bagian indikator ketakwaan.

Oleh sebab itu, ada beberapa langkah penting dan strategis dalam mengembangkan sikap toleransi beragama yang ditawarkan Dadang Kahmad, antara lain: *pertama*, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. *Kedua*, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda. *Ketiga*, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientas pada pengembangan aspek universal-*rabbânîyah*. *Keempat*, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia. *Kelima*, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar.[24]

Model pengembangan sikap toleran di atas akan lebih efektif apabila diinstitusionalisir dan diformulasi lebih efektif, salah satunya melalui lembaga pendidikan. Secara garis besar para pakar pendidikan

[22] Mahmoud Sadri dan Ahmad Sadri, "Kata Pengantar" dalam Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002), 203.
[23] Ibid., 18.
[24] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Rosda Karya, 2002), 151-152.

menyusunnya pada konsep pendidikan nilai (moral) dan karakter. Kata nilai bermakna suatu keyakinan yang dijadikan rujukan dalam menentukan pilihan dan tindakan.[25] Nilai sebagai realitas abstrak dapat dirasakan dalam diri seseorang sebagai pendorong dan prinsip dalam kehidupan, karena itu posisi nilai dalam kehidupan sangat penting. Sebagai realitas abstrak, nilai dapat dilacak dari tiga realitas di antara pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap.[26]

Semenjak awal pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga lembaga pewarisan nilai dan tradisi keagamaan.[27] Tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata untuk kecerdasan anak didik, melainkan untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan perilaku yang jujur dan bermoral, serta melatih anak didik untuk bisa hidup mandiri, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain kecuali hanya kepada Tuhan. Para Kiai selalu mendorong santri untuk terus belajar dengan menempatkan belajar sebagai kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, serta menanmkan nilai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmunya melalui penyebaran ilmu dan pengetahuannya tentang ajaran Islam kepada masyarakat luas.[28]

Walaupun pendidikan pesantren telah banyak melakukan perubahan, namun pesantren tetap lebih menekankan fungsi sebagai lembaga penjaga gawang moral masyarakat, dan sosialisasi nilai-nilai agama,[29] karena hal itu merupakan *khit}t}ah ma'hadîyah* yang tidak dapat ditinggalkan. Pendidikan nilai lebih ditekankan melalui metode modeling atau *uswah h}asanah* dari kiai sebagai panutan utama para santri dan masyarakat, serta pembiasaan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkannya. Proses pembelajaran yang integral melalui aktivitas belajar-mengajar, pembiasaan berperilaku luhur, aktivitas spritual, keteladanan, serta kontrol yang ketat melalui disiplin

[25] Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), 11.
[26] Ibid. 23.
[27] Jamas Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
[28] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 45.
[29] Fuaduddin TM, "Diversifikasi Pendidikan Pesantren: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 4 (2007), 15-16.

aturan tertib santri menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter mulia para santri.[30]

Pandangan Kiai dan Sumber Sikap Toleran

Pandangan pimpinan dan tenaga pendidik pesantren terhadap pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam dideskripsikan dalam tiga persoalan pokok, antara lain: *pertama*, pandangan terhadap pluralitas agama. *Kedua*, pandangan terhadap pluralitas paham keagamaan dalam Islam. *Ketiga*, titik temu agama-agama dan antar-paham keagamaan dalam Islam.

Para pimpinan dan tenaga pendidik di Pesantren Tebuireng Jombang dan Nurul Jadid Paiton menggunakan dua cara pandang dalam memahami pluralitas agama, teologis dan sosiologis. Secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai keniscayaan dan harus diterima sebagai sunnatullah. Secara sosiologis, fakta tersebut dipandang menjadi bagian dari rangkaian sejarah dan realitas kehidupan manusia, sehingga mereka bisa saling mengisi, membantu, dan menolong dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Bahkan kesadaran terhadap fakta pluralitas agama menjadi spirit dalam mendorong dinamika kehidupan beragama. Dengan menyadari di luar diri ada keyakinan yang juga diyakini kebenarannya oleh pihak lain dan dipersaksikan pada publik, maka umat beragama terdorong untuk menguatkan keyakinannya dan bergerak pula untuk mempersaksikan kebenaran yang diyakininya kepada pihak lain.

Dengan cara pandang tersebut, pluralitas agama bagi warga pesantren menjadi fakta yang tidak bisa diubah dan dipersoalkan. Disadari atau tidak kehadiran agama dalam diri manusia ada pada wilayah keyakinan personal yang tidak bisa dipaksakan, bebas dari intervensi manusia dan tidak bisa juga diganggu gugat keberadaannya. Bagi warga pesantren, fakta pluralitas tidak bisa dipisahkan dari otoritas Allah sebagai perancang dan penentu segala hal yang terjadi di dunia dan menjadi sunnatullah dalam ciptaan-Nya yang tidak tunggal. Karenanya, penerimaan terhadap pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari pilar keimanan yang harus ditegakkan.

Namun demikian, beberapa informan menegaskan bahwa kesadaran pluralitas agama sebagai realitas takdir tidak berarti

[30] Said Aqil Siradj, "Pesantren Pendidikan Karakter dan Keutuhan NKRI", dalam Ibi Syatibi dan Lanny Oktavia (eds.), *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* (Jakarta: Renebook, 2014), xi.

menempatkan kesamaan agama. *Pun*, kesadaran pluralitas agama tidak boleh melemahkan identitas diri sebagai Muslim. Sebagaimana ditegaskan KH. Shalahuddin Wahid (Pengasuh Ponpes Tebuireng) dan KH. Zuhri Zaini (Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton) yang meyakini agama Islam merupakan agama yang benar dan final, tetapi hal itu tidak kemudian perlu mengusik dan menegasikan kebenaran yang diyakini agama lain. Masing-masing agama mempunyai "ruang" kebenaran dalam agamanya dengan standar masing-masing agama.

KH. Musta'in Syafi'i menegaskan kesadaran pluralitas harus tetap diikuti dengan sikap kewaspadaan atas *grand design* umat agama lain dalam misi keagamaannya, sehingga hal itu dapat membentengi keimanan baik dalam diri sendiri maupun umat Islam.[31] Senada dengan hal itu Ustaz Didik juga menyadari bahwa kesadaran pluralitas harus tetap dalam komitmen mempersaksikan kebenaran Islam kepada orang lain, karena kabenaran Islam bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain.[32]

Para pimpinan dan tenaga pendidik di Ponpes Tebuireng Jombang dan Nurul Jadid Paiton memahami bahwa pluralitas paham keagamaan dalam Islam tidak ada yang perlu diragukan. Karena perbedaan yang terjadi antarpaham keagamaan dalam Islam bukan pada masalah *us}ûlîyah* melainkan pada masalah *furû'îyah* yang bersifat ijtihadi. *Pun*, perbedaan bukan pada Allah yang sama-sama diyakini sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, bukan masalah posisi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan bukan pula masalah al-Qur'ân dan al-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Jika ada yang meragukan Allah dan Nabi Muhammad, maka bagi Didik Priyagung Wicaksono (Ketua LPPM IAI Nurul Jadid) dan Ustaz Syamsuri Hasan (Dekan Fakultas Syariah IAI Nurul Jadid), keyakinan tersebut bukan paham keagamaan dalam Islam, bahkan bisa menjadi agama tersendiri.[33]

Perbedaan antarpaham keagamaan dalam Islam dipandang bukan masalah agama, tapi masalah pemahaman keagamaan yang berbeda ijtihad dalam mendekati teks-teks agama. Para informan rata-rata

[31] KH. Musta'in Syafi'i (pendidik di Ponpes Tebuireng), *Wawancara*, Jombang 24 April 2015.
[32] Didik Priyagung Wicaksono (Pendidik di Ponpes Nurul Jadid), *Wawancara*, Jombang 22 Mei 2015.
[33] Didik Priyagung Wicaksono (Ketua LPPM IAI Nurul Jadid) dan Ustaz Syamsuri Hasan (Dekan Fakultas Syariah IAI Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo 15 September 2015.

menyayangkan ketika perbedaan paham keagamaan yang tidak prinsip cenderung dibesar-besarkan. Konflik antarpenganut paham keagamaan dalam Islam dianggap akibat kontestasi di luar masalah keagamaan, terutama ihwal politik yang mewarnai perjalanan umat Islam sepanjang sejarah. Sebagaimana dinyatakan Nur Hannan, "kalau ditelaah secara genealogis, konflik antarpaham keagamaan bukan karena perbedaan dalam menangkap kebenaran, melainkan karena perbedaan kepentingan dalam wilayah politik kekuasaan".[34] Bahkan ditegaskan oleh Didik Priyagung Wicaksono, "apabila terjadi konflik antarpaham keagamaan dalam Islam, pada saat itu posisi Allah sebagai Tuhan tergantikan oleh tuhan-tuhan dari masing-masing kelompok yang berupa kepentingan-kepentingan, dan al-Qur'ân tergantikan oleh fatwa pimpinan kelompoknya".[35]

KH. Musta'in Syafi'i dan Ustaz Nur Hannan menunjukkan rasa herannya ketika menyaksikan kondisi internal umat Islam yang karena berbeda terkait masalah ijtihad tetapi berkonflik cukup keras jika dibandingkan hubungan antara umat Muslim dengan non-Muslim. Bagi keduanya, sesama Muslim mestinya harus lebih mudah untuk berdamai, karena dalam banyak hal yang fundamental lebih bisa berinteraksi dengan baik.[36]

Terkait titik temu agama-agama dan antarpaham keagamaan dalam Islam, Gus Shalah (KH. Shalahuddin Wahid) menegaskan pencarian titik temu ini adalah untuk mengurangi gesekan, bukan untuk menyatukan atau meleburkan agama-agama menjadi satu. Begitu pula terkait titik temu paham keagamaan, kalaupun Tuhan, Nabi, dan al-Qur'ânnya sama itu sulit untuk menjadi satu paham karena adanya ruang untuk berbeda dalam ijtihad.[37]

KH. Zuhri Zaini menyebutkan tiga temu fundamental antaragama-agama, antara lain: *pertama*, adanya keyakinan kepada kekuatan Zat gaib yang menguasai alam semesta, walaupun dengan sebutan dan struktur yang bermacam-macam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing masing pemeluk agama. *Kedua*, adanya pemujaan terhadap Zat yang gaib tersebut berupa ritual keagamaan, walaupun dengan bentuk dan cara yang berbeda-beda sesuai dengan

[34] Nur Hannan (Mudir Ma'had Aly Tebuireng), *Wawancara*, Jombang 11 Juni 2015.
[35] Didik Priyagung Wicaksono (Ketua LPPM IAI Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo 15 September 2015.
[36] KH. Musta'in Syafi'i dan Ustaz Nur Hannan, *Wawancara*, Jombang 11 Juni 2015.
[37] KH. Shalahuddin Wahid (Pengasuh Pesantren Tebuireng), *Wawancara*, Jombang 14 Januari 2015.

keyakinan masing masing pemeluknya. *Ketiga*, adanya kesamaan beberapa ajaran, khususnya menyangkut etika sosial antara agama-agama (nilai-nilai universal), misalanya anjuran bersikap jujur, setia, saling tolong-menolong dan lain lain.[38]

Para informan lainnya juga menegaskan bahwa tidak ada yang mengingkari terhadap tiga titik temu agama-agama tersebut. Bahkan KH Romzi al-Amiri Mannan, Mudir Ma'had Aly Nurul Jadid, menyatakan bahwa titik temu tersebut tidak hanya antaragama samawi, bahkan dengan agama *ard}î* pun ada titik temu dalam tiga titik fundamental tersebut. Karena dalam agama Hindu-Budhha, Tuhan yang disembah juga Zat yang gaib, sedangkan patung-patung hanya merupakan media untuk menuju Tuhan. Hanya saja—menurut Gus Zaki Hadzik dan KH. Musta'in Syafi'i—walaupun semua agama meyakini Tuhan yang ghaib, namun harus ada kesadaran bahwa masing-masing agama memiliki konsepsi dan konstruk yang berbeda tentang Tuhannya, sehingga tidak bisa disamakan antara Tuhan agama yang satu dengan Tuhan agama yang lain.[39]

Namun demikian, menurut KH. Romzi al-Amiri Mannan, walaupun secara konsepsional antarpaham keagamaan memiliki titik temu yang kuat, pada realitasnya sulit untuk dipertemukan apalagi disatukan. Karena masing-masing paham keagamaan mengklaim pahamnya paling benar, bahkan tidak sedikit yang memandang paham keagamaan di luar dirinya sebagai paham yang sesat. Hal ini karena masing-masing paham keagamaan berebut menjadi yang satu yang dinyatakan selamat oleh Rasulullah.[40]

Jika data wawancara di atas dianalisis menggunakan paradigma eksoterisme dan esoterisme beragama dapat disimpulkan bahwa para informan menyepakati fakta pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam tidak berpijak pada paradigma eksoterisme dan esoterisme ekstrem, karena di samping mengakui eksistensi agama-agama sebagai institusi yang tidak dapat disatukan, di sisi yang berbeda mereka mengakui adanya titik temu fundamental antaragama-agama dan antarpaham keagamaan dalam Islam.

Model pembacaan tersebut bila dikaitkan dengan akar sejarah pendidikan pesantren erat kaitannya dengan dua basis keilmuan

[38] KH. Zuhri Zaini, (Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton), *Wawancara*, Probolinggo 21 Maret 2015.
[39] Gus Zaki Hadzik dan KH. Musta'in Syafi'i, *Wawancara*, Jombang 04 Juni 2015.
[40] KH. Romzi al-Amiri Mannan, *Wawancara*, Probolinggo 04 Juni 2015.

pesantren, yaitu: fiqh dan tasawuf. Dengan hadirnya fiqh atau praktik tarekat yang berbasis sharî'ah dalam pendidikan pesantren, maka kelenturan fiqh dan esoterisme tasawuf dapat mendesain pemikiran moderat untuk tumbuh dan berkembang dalam pendidikan pesantren.

Bagan 1
Pandangan Moderat Pimpinan dan Tenaga Pendidik Pesantren terhadap Pluralitas Agama dan Paham Keagamaan dalam Islam

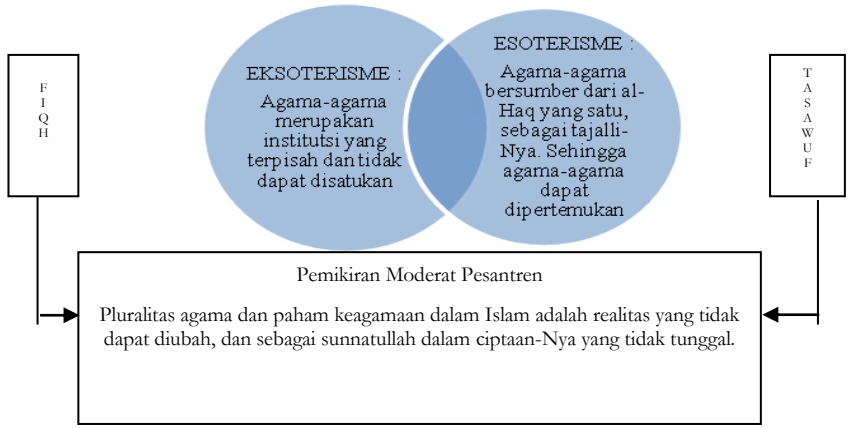

Pandangan moderat pimpinan dan tenaga pendidik pesantren apabila dibaca dengan menggunakan paradigma eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme dapat dikategorikan sebagai pemikiran inklusif-pluralis. Karena pada satu sisi bersifat terbuka dengan keyakinan dan paham yang ada di luar dirinya, namun tetap berpandangan bahwa perbedaan dalam pluralitas sebagai identitas tidak bisa diubah, karena upaya menyatukan yang plural merupakan tindakan yang bertentangan dengan sunnatullah yang tidak tunggal. Hanya saja dengan beberapa titik temu khususnya dalam nilai-nilai kemanusiaan universal, umat beragama atau penganut paham keagamaan dalam Islam dapat bersama-sama menyelesaikan problem kehidupan. Karena itu, dalam membangun relasi sosial pesantren tidak berpijak pada perbedaan, tapi mencari persamaan, khususnya dalam ajaran kemanusiaan yang bersifat universal.

Paradigma inklusivisme, memiliki konsep bahwa: a). Setiap agama memiliki *platform* kebenarannya sendiri sesuai ajaran masing-masing, b). Terdapat ruang kesamaan esoteris (*common word/platform*) dalam setiap agama yang secara eksoterik berbeda, c) Lebih memilih ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan, dan d). Lebih cenderung memilih jalan damai dibandingkan kekerasan.

Berbeda dengan paradigma eksklusivisme yang berpandangan kebenaran agama hanya terdapat pada satu agama. Tidak ada agama benar selain agama yang dipeluk dan diyakininya. Cara pandang demikian tidak salah bila digunakan untuk membangun komitmen keagamaan secara internal, karena tanpa klaim kebenaran sulit membangun komitmen kepatuhan pada ajaran agama. Namun demikian, kerangka berpikir eksklusif memandang agama-agama berdampak negatif karena beberapa hal, antara lain: a). Adanya proses pemaksaan untuk menyeragamkan keyakinan orang yang berbeda, b). Tidak menghargai kebenaran agama lain yang diyakini pemeluknya sebagai kebenaran, c). Memandang setiap orang yang berbeda dengan dirinya ada dalam kesesatan, dan d). Memberi ruang untuk bertindak anarkis dalam menghadapi pihak-pihak yang dipandang sesat tersebut.

Sedangkan paradigma pluralisme memandang pluralitas agama dan paham keagamaan merupakan keniscayaan yang tidak dapat diubah, perbedaan merupakan identitas diri untuk saling mengenali, namun di atas perbedaan ada persamaan-persamaan yang dapat dijadikan titik berangkat dalam membangun kebersamaan dalam suasana damai dan harmonis dalam penyelesaian masalah kemanusiaan.

Dalam paham tentang pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam, pimpinan dan tenaga pendidik Ponpes Tebuireng dan Nurul Jadid menempatkan nilai toleransi sebagai modal dan model utama dalam berinteraksi. Toleransi dimaknai sebagai wujud penerimaan terhadap perbedaan keyakinan atau pemahaman terhadap agama, dan menghargai perbedaan-perbedaan yang terdapat antaragama dan paham keagamaan lainnya. Namun demikian, toleransi terhadap keyakinan atau agama lain tidak berarti mencampuradukkan keyakinan dan peribadatan antaragama, sebagai Muslim harus tetap berkomitmen pada keyakinan terhadap kebenaran agama sendiri dan diikuti dengan agenda jangka panjang yang jelas dalam menjalankan missi agama. Menurut KH. Musta'in Syafi'i dan Gus Zaki Hadzik, toleransi yang ditunjukkan dalam kehidupan lintas agama bukan karena keimanan yang lemah, sehingga tidak dapat menunjukkan identitas dirinya sebagai Muslim. Toleransi menjadi bagian dari *grand design* dakwah Islamiah untuk jangka panjang.

Menurut Gus Sholah, wujud aplikasi nilai toleransi dalam kehidupan umat beragama bisa dengan tindakan toleransi pasif atau toleransi aktif. Tindakan toleransi pasif diwujudkan dalam bentuk

menerima kehadiran umat agama dan penganut paham keagamaan yang plural dalam kehidupan sosial dengan menghargai perbedaan yang ada dalam pluralitas dan tidak mengusik kebenaran yang diyakini pemeluk agama lain. Adapun toleransi aktif diwujudkan bukan hanya menerima dan menghargai perbedaan, melainkan memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama dan penganut paham keagamaan yang berbeda, baik terhadap keselamatan dirinya maupun tempat ibadahnya ketika ada gangguan dari pihak lain. Kiai Zuhri pun menegaskan sepanjang pengembangan ajaran agama dan paham keagamaan yang dilakukan orang lain tidak mengganggu ketertiban sosial, maka itu harus dihargai, karena hal tersebut merupakan hak keagamaan yang dimiliki setiap pemeluk keyakinan.[41]

Perbedaan yang bersifat *furû'iyah* tidak mengakibatkan status perbedaan itu keluar dari Islam. Sejatinya, hal itu bisa dijadikan kekayaan umat Islam dalam memberikan banyak alternatif jalan menuju Allah. Kiai Zainul Arifin menyatakan sia-sia menjadikan Islam sebagai satu mazhab atau satu paham keagamaan, karena perbedaan dalam pemahaman keagamaan mendapatkan "ruang" dalam Islam.[42]

Pengembangan nilai toleransi dan budaya damai dalam sistem sosial pesantren merupakan wujud dari karakter jiwa besar yang dimiliki masyarakat pesantren. Mereka siap hidup damai dalam kehidupan plural dengan menerima dan menghargai perbedaan. Kesadaran pluralitas memposisikan para santri bukan satu-satunya masyarakat penghuni bumi, sehingga mereka siap hidup berdampingan dengan penghuni lainnya, bahkan mereka bisa membangun sinergi dengan komunitas lain dalam penyelesaian bersama masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapi.

Kesiapan pesantren hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat plural tidak bisa dilepaskan dari basis teologis yang inklusif-pluralis dan keilmuan fiqh dan tasawuf yang menjadi basis keilmuan pesantren. Fiqh yang berkarakter lentur turut memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter fleksibel warga pesantren dalam membangun relasi sosial tanpa menggoyahkan komitmen dalam menjaga identitas sebagai Muslim.

---

[41] KH. Zuhri Zaini (Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton), *Wawancara*, Probolinggo 21 Maret 2015.

[42] Kiai Zainul Arifin (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Jadid), *Wawancara*, Probolinggo 22 Maret 2015.

Ideologi Pendidikan dan Rekonstruksi Desain Pendidikan Toleran di Pesantren

Secara politik kenegaraan Pesantren Tebuireng Jombang dan Nurul Jadid Paiton berideologi Pancasila. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dakwah, pendidikan, dan sosial masing-masing pesantren memiliki basis ideologi lokal sebagai dasar pijakan dalam pembinaan santri. Terdapat lima nilai dasar santri di Pesantren Tebuireng Jombang, antara lain: 1) Ikhlas, 2) Jujur, 3) Bertanggung jawab, 4) Kerja Keras, dan 5) Toleransi. Lima nilai dasar tersebut merupakan kristalisasi nilai yang dikembangkan sejak masa KH. Hasyim Asyari walaupun baru terumuskan pada masa Gus Sholah sebagai Pimpinan Pesantren Tebuireng.

Sedangkan di Pesantren Nurul Jadid terdapat Trilogi Santri dan Panca Kedasaran Santri sebagai ideologi pendidikan yang dirumuskan oleh pendiri dan pengasuh pertama, KH. Zaini Mun'im. Trilogi Santri tersebut antara lain: *pertama*, berkomitmen terhadap hal *fard} 'ayn* (*al-ihtimâm bi al-furûd} al-'aynîyah*), *kedua*, berkomitmen meninggalkan dosa besar (*al-ihtimâm bi tark al-kabâir*), dan *ketiga*, bersikap dan berperilaku baik terhadap Allah dan seluruh ciptaan-Nya *h}usn al-adâb ma'a Allah wa ma'a al-khalq*). Adapun Panca Kesadaran Santri antara lain: kesadaran beragama, kesadaran berilmu, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berorganisasi, dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Walaupun dalam Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri tidak tertuang secara eksplisit nilai toleransi, namun secara implisit dua dasar itu mengandung nilai toleransi.

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pesantren dalam membangun toleransi adalah mengembangkan budaya toleran, harmoni dan damai dalam kehidupan para santri, baik dalam relasi sosial antarwarga pesantren (kiai, ustaz, dan santri) maupun dengan warga di luar pesantren. Langkah ini telah membudaya sejak awal pertumbuhan pesantren. Kehidupan plural warga pesantren bukan sesuatu yang baru. Pada sisi yang lain, kehadiran pesantren, baik Tebuireng maupun Nurul Jadid, tidak hadir di tengah kawasan atau ruang yang kosong. Keduanya hadir di tengah masyarakat yang plural, baik budaya, kepercayaan ataupun agama. Di tengah kehidupan sosial yang plural itulah pesantren Tebuireng dan Nurul Jadid bergumul dalam menjalankan misi dakwah, pendidikan dan sosial tanpa ada gejolak sosial. Karena semenjak awal dua pesantren tersebut menjadi bagian dari masyarakat luas yang dapat menghargai perbedaan dan

memperjuangkan kehidupan secara harmonis dan damai. Strategi tersebut menjadikan pesantren tidak mudah terpancing untuk terlibat dalam berbagai konflik sosial, sehingga kehadirannya tidak mengalami resistensi.[43]

Apabila dibaca dari teori penanaman nilai moral dalam pembentukan karakter sebagaimana dirumuskan Thomas Lickona, pendidikan toleransi di pesantren menekankan pada tiga komponen, yaitu: *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan moral). Menurut Lickona, jika penanaman nilai moral dalam pendidikan karakter hanya sampai pada *moral knowing*, maka pendidikan nilai hanya melahirkan orang-orang pintar tapi tidak benar. Karena itu dari tahapan *moral knowing* harus dilanjutkan pada *moral feeling* dan *moral action*.[44] Sedangkan pendidikan toleransi di pesantren tidak menempatkan *moral knowing* sebagai langkah utama, melainkan *moral modeling* dan *moral habituation.*

Strategi pendidikan toleransi di pesantren mendahulukan *moral modeling* yang diteladankan oleh kiai dan tenaga pendidik lainnya, kemudian diikuti dengan langkah *moral habituatin* (pebiasaan moral) melalui pembiasaan hidup toleran. Dari dua langkah awal tersebut, tumbuh *moral feeling* (perasaan moral) yang diserap dari keteladanan dan pembiasaan hidup toleran. Sedangkan *moral knowing* terkesan hanya dijadikan sebagai langkah pelengkap yang tidak tersajikan secara sistemik. Pendidikan toleransi di pesantren memiliki landasan pijak pada pemikiran Abû H{âmid al-Ghazâlî dalam teori pembentukan moral. Menurut al-Ghazâlî, transfer pengetahuan moral hanya bisa menyelesaikan ketidaktahuan (kebodohan) terhadap moral yang diajarkan. Memperbaiki sikap dan perilaku (akhlaq) hanya bisa dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat menyelesaikan problem akhlaq, kemudian dilakukan pembiasaan berperilaku sesuai dengan moral yang dikehendaki. Dengan demikian, nilai yang ditanamkan menjadi kebiasaan dan karakter dalam kehidupan. Al-Ghazâlî dalam pengembangan teorinya menganalogikan dengan nilai kesehatan, di mana apabila yang dihadapi orang-orang sehat, cukup dijelaskan pola hidup sehat agar dapat mempertahankan kesehatannya. Tapi kalau

[43] Abdul Mun'im DZ, "Pergumulan Pesantren dengan Masalah Kebudayaan", dalam Badrus Shaleh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), 54.

[44] Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), 52-62.

yang dihadapi orang sakit, maka harus dilakukan diagnosis untuk mengetahui penyakitnya dan dapat menentukan obatnya, kemudian memerintahkan pasien untuk mengonsumsi obat secara rutin, agar penyakitnya cepat sembuh.[45]

Secara sistematis desain pendidikan toleransi di pesantren dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, Tujuan Pendidikan. Pendidikan toleransi di pesantren bertujuan membentuk santri bersikap dan bertindak toleran dalam menghadapi kenyataan hidup yang pluralistik, khususnya dalam menghadapi fakta pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam, sehingga para santri mampu merwujudkan kehidupan yang harmoni dan damai dalam kehidupan sosial yang heterogen.

Kedua, Landasan Fondasional Pendidikan Toleransi. Landasan ini dimaksudkan sebagai pijakan dasar dalam pendidikan toleransi di pesantren. Hal ini penting dimiliki agar pendidikan toleransi mempunyai fondasi kuat dan benar. Berdasarkan hasil temuan data penelitian, pendidikan toleransi di Pondok Pesantren Tebuireng dan Nurul Jadid mempunyai empat landasan fondasional:

a) Landasan Teologis.

Secara teologis masyarakat di pesantren meyakini pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam merupakan sunnatullah. Hal initidak bisa dilepaskan dari prinsip aqidah yang memposisikan segala sesuatu yang ada merupakan kehendak dan ketetapan Allah. Terdapat titik temu antaragama dan paham-paham keagamaan sebagaimana yang terurai dalam paradigm inklusivisme terhadap fakta keragaman. Walaupun demikian, posisi pesantren tidak dalam rangka mencampuradukkan agama-agama dan paham keagamaan. Mereka membangun filosofi kebersamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan.

b) Landasan Etik

Nilai etik yang menjadi landasan pendidikan toleransi di pesantren adalah nilai-nilai sufistik. Di antara nilai-nilai tasawuf yang mendasari pendidikan toleransi di pesantren adalah *rid}â*, *mah}abbah*, *îkhâ'*, *musâwah*, dan *tawassut}*. Lima nilai tersebut merupakan nilai-nilai fundamental dalam menumbuhkan sikap dan tindakan toleransi. Nilai *Rida*, menuntun manusia untuk bersedia menerima semua ketetapan Allah. *Mah}abbah* menuntun manusia untuk mencintai semua ciptaan Allah sebagai manefestasi kecintaannya pada Allah. *Îkhâ'*, menuntun

[45] Abû Ḥâmid al-Ghazâlî, *Mîzân al-'Amal* (t.t.: t.tp., t.th.), 15-17.

manusia untuk memandang seluruh manusia sebagai saudara. Dalam komunitas pesantren, persaudaraan yang dibangun bukan sekadar saudara sesama Muslim (*ukhuwwah Islâmîyah*), namun juga saudara sebangsa dan setanah-air (*ukhuwwah wat}anîyah*) dan saudara sesama manusia (*ukhuwwah basharîyah*). *Musâwah* merupakan nilai yang menempatkan posisi manusia sama di hadapan Allah, sehingga menuntun hidup manusia untuk saling menghargai, membantu, dan menolong. *Tawasut}* merupakan nilai yang menuntun manusia bersikap moderat dalam menyikapi perbedaan. Dengan menempatkan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama, pendidikan toleransi di pesantren secara etik merupakan pendidikan humanisme teosentris.

c) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pendidikan toleransi di pesantren adalah bahwa pluralitas agama dan paham keagamaan merupakan realitas hidup dan menjadi *social capital* yang dapat didayagunakan untuk bisa saling melengkapi dalam kehidupan sosial yang interdependen. Apabila perbedaan dikelola secara benar dengan menerima dan menghargai perbedaan, maka keberadaan pluralitas agama dan paham keagamaan dapat menjadi sumber daya sosial yang menguatkan dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman, serta menjadi kekuatan dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan secara bersama dalam suasana kedamaian.

Pandangan sosiologis ini tidak bisa dipisahkan dengan pandangan teologis dan nilai-nilai etik yang dikembangkan komunitas pesantren. Relasi kiai-santri-masyarakat merupakan relasi sosial yang dibangun di atas kesadaran interdependensi, sehingga terbuka ruang untuk saling menerima, menghargai, mengasihi, membantu, dan menolong. Relasi tersebut terbangun sejak awal perintisan pesantren, di mana kiai pada saat menancapkan niatnya mendirikan pesantren di suatu kawasan. Kiai selalu memposisikan masyarakat yang plural sebagai patner dalam melakukan perbaikan kehidupan sosial, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kiai-santri sebagai warga pesantren dengan masyarakat sekitar pesantren.

d) Landasan Ideologis

Nilai toleransi pada dasarnya merupakan nilai yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat yang menyadari arti penting kehidupan bersama, sehingga tumbuh rasa untuk saling menghargai antara satu dengan lainnya. Kemudian penghargaan itu menjadi gerakan bersama

solidaritas dalam menghadapi masalah. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ideologi Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan dan budaya bangsa yang di dalamnya terdapat nilai toleransi.

Pun dalam pendidikan toleransi di pesantren, di mana Pesantren Tebuireng dan Nurul Jadid menjadikan nilai toleransi sebagai basis ideolog pancasila dan ideologi lokal yang dibangun di pesantren, Tebuireng dengan lima Nilai Dasar dan Nurul Jadid dengan Trilogi Santri dan Panca Kesadaran Santri.

Ketiga, Kekuatan Dasar Pendidikan Toleransi di Pesantren. Kekuatan tersebut meliputi:

a) Kiai dan tenaga pendidik yang moderat dan inklusif-pluralis.

Posisi kiai dan tenaga pendidik merupakan kekuatan dasar utama dalam pendidikan toleransi di pesantren. Hal ini bukan hanya karena kapasitas kiai dan tenaga pendidik dalam mengendalikan sumber daya pesantren untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melainkan tindakan toleransi kiai yang diikuti para tenaga pendidik menjadi sumber pengetahuan dan keteladanan bagi seluruh santri, sehingga dengan mudah tercipta perilaku kolektif toleran di pesantren sebagai wahana penyerapan nilai toleransi yang telah lama ada dalam kehidupan sosial pesantren.

b) Budaya damai dan toleran

Kehidupan damai dan toleran merupakan norma yang telah menyejarah dalam perjalanan pendidikan pesantren. Posisinya menjadi semakin kokoh, dengan *tolerance exhibition* yang diperankan oleh kiai dan tenaga pendidik dalam tindakannya menghadapi pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam. Karena itulah para santri juga terbiasa meneruskan *uswah h}asanah* dari kiai dan para guru.

c) Institusi pesantren yang terbuka

Keberadaan pesantren yang secara kelembagaan terbuka terhadap pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam menjadi kekuatan dasar dalam desain pendidikan toleransi di pesantren. Pesantren menerima kehadiran pihak-pihak yang berbeda; bersosialisasi dan memberikan kontribusi terhadap pengokohan toleransi yang semula bersumber dari aktor rasional individual, pada akhirnya bisa berwujud *actor corporate*.

d) Relasi sosial kiai-santri

Kiai tidak sekadar dipandang sebagai sosok yang memiliki otoritas bidang keagamaan. Ia diyakini sebagai sumber kebaikan (*barakah*).

Dengan cara pandang santri terhadap kiai tersebut, maka santri dengan mudah melakukan internalisasi nilai toleransi ke dalam dirinya, sebagaimana tindakan toleransi yang diteladankan kiai dan para tenaga pendidik pesantren lainnya.

Keempat, Komponen dan Strategi Proses Pendidikan Toleransi di Pesantren. Komponen tersebut meliputi *moral modeling*, *moral habituation*, *moral feeling*, dan *moral knowing*. Strategi proses yang ditempuh menetapkan *moral modeling* (teladan moral) yang diperankan oleh kiai sebagai langkah utama, kemudian diikuti langkah *moral habituation* (pembiasaan moral), sehingga terjadi proses *moral feeling* (perasaan moral), dan dilengkapi dengan *moral knowing* (pengetahuan moral). Untuk *moral knowing*, pendidikan toleransi di pesantren kurang mendapatkan *stressing*, di mana pembelajaran toleransi hanya dipandang telah disampaikan secara integral dalam beberapa mata pelejaran yang relevan, tanpa ada perencanaan, baik dalam kurikulum, pelaksanaan, maupun evaluasinya.

a) *Moral Modeling*

Pendidikan toleransi di pesantren, dilakukan melalui keteladan perilaku toleran oleh pimpinan dan tenaga pendidik dalam menghadapi kenyataan pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam. Para santri sebagai peserta didik, dapat menyaksikan langsung praktik tindakan toleransi yang diperankan kiai dan ustaz dalam setiap menerima kunjungan tamu, penerimaan tenaga pendidik non-agama dan patner kerjasama dari lintas agama dan paham keagamaan. Dengan pola *tolerance exhibition* yang ditampilkan dua pesantren tersebut, peserta didik (santri) dapat dengan mudah menyerap nilai toleransi sebagai pandangan hidup. *Tolerance exhibition* menjadi kurikulum yang hidup dalam pendidikan toleransi di pesantren.

Di samping teladan moral yang diperankan kiai dan tenaga pendidikan lainnya, sumber teladan moral di pesantren juga dapat digali dari perilaku para kiai terdahulu, bahkan para Walisongo yang meletakkan dasar pendidikan pesantren di Nusantara, dan keteladanan Rasulullah dalam menghadapi komunitas non-Muslim.

b) *Moral Habituation*

Ketauladan pimpinan dan tenaga pendidik dalam tindakan toleransi, diikuti dengan langkah pembiasaan hidup santri berperilaku toleran, baik dalam pergaulan sehari-hari di internal pesantren yang diwarnai pluralitas paham keagamaan, bahkan pluralitas agama, di samping pluralitas suku, bahasa, dan budaya, maupun dalam

pergaulan lintas agama dengan komunitas non-Muslim yang datang berkunjung ke pesantren.

Penanaman nilai toleransi juga ditemukan dalam pembiasaan santri pada pendidikan tinggi, mengenali keanekaragaman pendapat dalam berbagai pengetahuan (ilmu kalam, fiqh, usul fiqh, dan tafsir) yang diajarkan di pesantren. Pembiasaan santri mengahadapi keanekaragaman pendapat, menjadi proses pembiasaan santri hidup dalam pluralitas pemikiran dan pemahaman keagamaan, dan para santri dapat menyerap nilai toleransi dari etika perbedaan pendapat yang didapatkan dari teladan moral ulama salaf, terutama para Imam Mujtahid.

c) *Moral Feeling*

Melalui teladan moral tindakan toleransi, yang diperankan kiai dan tenaga pendidik serta sumber teladan lainnya, dan pembiasaan moral peserta didik (santri) dalam kehidupan toleran, maka terjadilah proses pematangan emosi peserta didik dalam menangkap makna kebenaran toleransi.

Penyerapan nilai toleransi yang ditansformasikan melalui *moral modeling* dan *moral habituation* dapat membangkitkan sisi emosional yang ada dalam nurani peserta didik untuk merasakan kewajiban menghargai orang lain, berempati, tidak berburuk sangka pada orang lain yang berbeda, bersikap dan bertindak positif, mampu mengendalikan diri, tidak arogan dan memelihara rasa rendah hati.

d) *Moral Knowing*

Pengetahuan tentang toleransi walaupun tidak ditransfer dengan sistemik dalam pembelajaran tertentu, namun demikian dalam pengarahan umum kepada para santri, terutama pada saat ada kunjungan tamu lintas agama, pengenalan ideologi pendidikan pesantren pada masa orientasi santri baru, nilai dan tindakan toleransi disampaikan kepada para santri. Di samping itu dalam beberapa mata pelajaran terkait seperti: aswaja, PPKn, studi agama-agama, sosiologi agama, komunikasi multikultural yang diajarkan pada lembaga pendidikan formal, nilai toleransi dapat disampaikan secara integral.

Pendidikan toleransi yang ditekankan pada penanaman nilai moral dalam pembentukan perilaku toleran, dengan proses internalisasi melalui keteladanan dan pembiasaan, maka evaluasinya lebih ditekankan pada pengamatan. Dalam hal ini pimpinan pesantren (kiai) bersama para tenaga pendidik lainnya secara aktif melakukan pengamatan terhadap perilaku santri, bahkan para santri yang telah

lulus (alumni). Relasi kiai-santri yang berlangsung tanpa batasan waktu, memungkinkan kiai untuk terus melakukan kontrol terhadap perilaku santri, walaupun santri sudah ada di tengah-tengah masyarakatnya.

Bagan 2
Desain Pendidikan Toleransi di Pesantren

A. Kekuatan Dasar

B. Komponen dan Strategi Proses

Moral Modelling	Tindakan moral (toleransi) yang diteladankan kiai dan tenaga pendidik pesantren, baik yang langsung maupun yang bersumber dari teladan moral para tokoh pendahulunya dalam menghadapi pluralitas agama dan pemikiran keagamaan dalam Islam
Moral Habituation	Pembiasaan hidup toleran dalam sistem sosial pesantren yang inklusif, baik dalam menghadapi fakta pluralitas, suku, Bahasa, budaya, dan agama serta paham keagamaan dalam Islam. Pembiasaan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat menjadi sumber pluralitas paham keagamaan dalam Islam
Moral Feeling	Perasaan moral yang diserap dari teladan moral, tindakan toleransi, dan pembiasaan hidup toleran dalam sistem sosial pesantren yang inklusif
Moral Knowing	Pengenalan nilai toleransi secara integral dalam beberapa mata pelajaran, dan nilai toleransi yang dikandung dalam ideologi pendidikan pesantren

Dalam konteks pendidikan toleransi di pesantren, kiai sebagai pimpinan pesantren, merupakan aktor rasional individual, mampu mengendalikan sumber daya sistem sosial untuk mencapai tujuan yang dipilihnya, dalam mengambil tindakan sosial toleransi di tengah-

tengah pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam. Tujuan tindakan toleransi yang dipilih kiai sebagai aktor rasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka berpikir teologis, etis, sosiologis dan ideologis, yang berbasis pada paradigma eksoterisme-esoterisme, inklusivisme dan pluralisme. Ideologi pendidikan pesantren yang inklusif dan toleran yang menjadi warisan pendiri dan pengasuh pendahulunya. Semua itu menjadi basis pilihan tindakan rasional kiai dalam mengembangkan pendidikan toleransi di pesantren.

Kapasitas kiai sebagai aktor sentral dalam pendidikan pesantren tidak saja diposisikan sebagai patron. Ia diyakini menjadi sumber kekuatan spiritual (barakah), maka dalam pendidikan toleransi yang mengandalkan *moral modeling* (keteladanan), *moral habituation* (pembiasaan moral) dan *moral feeling* (perasaan moral), hal itu menjadi proses transformasi dalam kehidupan warga pesantren. Proses tersebut berjalan dengan mudah dan terwujud perilaku kolektif tindakan toleran dalam kehidupan pesantren.

Norma toleransi yang telah terwujud dalam kesejarahan pesantren terbentuk dari relasi pesantren dengan budaya lokal, interkoneksitas ajaran agama Islam yang *rah}mah li al-'âlamîn* dengan konteks medan dakwah pesantren yang tidak berada pada ruang kosong, sehingga kehidupan yang harmoni dan damai menyertai dinamika perjalanan pendidikan pesantren. Perilaku kolektif toleran yang dihasilkan dari tindakan rasional kiai memberikan kontribusi terhadap penguatan norma toleransi dalam kehidupan sosial warga pesantren, baik dalam tindakannya terhadap fakta pluralitas agama atau paham keagamaan dalam Islam.

Kesadaran kolektif terhadap nilai toleransi yang mengikat dalam kehidupan pesantren, melahirkan *actor corporate* (aktor kolektif) yang sama-sama mengikatkan dirinya pada norma toleransi, sehingga tindakan toleransi yang semula ada pada tingkat mikro, selanjutnya menjadi tingkat makro.

Lahirnya aktor korporat dalam pendidikan pesantren, dibuktikan dengan inklusivitas kebijakan pesantren dalam pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif-pluralis. Mulai dari mengakomodir tenaga pendidik mata pelajaran non-agama dari kalangan non-Muslim, sampai dengan kerjasama proyek kemanusiaan yang tidak mempertimbangkan latar belakang agama dan paham keagamaannya, baik pada tingkat mitra kerja maupun sasaran.

Ada interkoneksitas antara komponen mikro dan makro sistem sosial pesantren dalam pendidikan toleransi. Kiai sebagai aktor individual rasional pada tingkat mikro sejalan dengan pandangannya yang dibangun di atas paradigma eksoterisme-esoterisme agama dan inklusivisme-pluralisme. Pula hal itu terikat dengan budaya damai dan toleran yang menjadi warisan pesantren. Jati diri kiai yang moderat, inklusif, dan pluralis menjadi kekuatan utama dalam proses *moral modeling*, *moral habituation*, dan *moral feeling* dalam pendidikan toleransi, sehingga dengan mudah tercipta perilaku kolektif toleran, baik di kalangan tenaga pendidik maupun peserta didik.

Pembiasaan hidup toleran bagi warga pesantren, dengan membiarkan umat beragama lain (non-Muslim) dan penganut paham keagamaan yang plural beraktivitas di pesantren menguatkan budaya damai dan toleran yang telah menyejarah dalam pendidikan pesantren. Dengan demikian, semua komponen dalam pendidikan pesantren, terikat dengan norma toleransi, sehingga tindakan toleran menjadi tindakan aktor korporat.

Penutup

Tujuan akhir pendidikan toleransi adalah mewujudkan santri toleran yang memiliki jiwa besar, bersedia menerima dan menghargai kenyataan perbedaan yang ada di sekeliling hidupnya, bukan saja perbedaan dalam suku, bahasa, dan budaya, bahkan dalam perbedaan keyakinan (agama) dan paham keagamaan dalam Islam.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pendidikan pesantren memiliki empat kekuatan dasar, yaitu: *Pertama*, kiai dan tenaga pendidik yang berpandangan moderat, inklusif, dan pluralis. *Kedua*, budaya damai dan toleran yang menyejarah dalam perjalanan pesantren, yang dibangun di atas nilai-nilai sufisme dan kelenturan fiqh, sebagai basis keilmuan pesantren. *Ketiga*, inklusivitas kelembagaan pesantren, dan *Keempat*, relasi kiai-santri yang memiliki hubungan khusus (memandang kiai bukan hanya sebagai sumber otoritas dalam keagamaan, bahkan dipandang sebagai sumber kebaikan/barakah) dalam relasi kiai-santri.

Warisan budaya damai dan toleran yang dibangun diatas nilai-nilai sufisme dan kelenturan fiqh sebagai basis keilmuan pesantren, merupakan kekuatan (pilar) kedua dalam pendidikan toleransi di pesantren. Nilai-nilai yang diwariskan pendiri pesantren, dalam sistem tata nilai pesantren, senantiasa memperoleh tempat yang tinggi, karena itu dalam pendidikan toleransi, para pendidik di pesantren senantiasa

menjadikan pendiri dan pimpinan berikutnya, sebagai referensi tindakannya (menjadi teladan moral).

Pendidikan toleransi di pesantren, memiliki landasan paradigmatik yang kuat, yaitu paradigma eksoterisme-esoterisme yang berimplikasi pada pandangan yang holistik dalam melihat agama, dan paradigma inklusivisme-pluralisme dalam memandang fakta pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam. Dengan paradigma tersebut, maka pengembangan nilai toleransi dalam pendidikan pesantren akan dapat dikendalikan, untuk tidak terjebak pada liberalisasi agama atau singkritisasi agama.

Strategi proses dalam pendidikan toleransi, dengan memberi *stressing* pada tiga langkah utama pendidikan nilai, yaitu: *moral modeling*, keteladanan kiai dan tenaga pendidik dalam melakukan tindakan toleransi, *moral habituation,* pembiasaan hidup toleran dalam pluralitas agama dan paham keagamaan dalam Islam dan *moral feeling,* perasaan toleran yang tumbuh dari penyerapan nilai toleransi melalui *moral modeling* dan *moral habituation*. Sedangkan *moral knowing*, hanya menjadi langkah pelengkap dengan memposisikan pengetahuan tentang toleransi dicukupkan dengan tebaran nilai toleransi yang integral dalam ragam mata pelajaran dan mata kuliah yang terkait.

Daftar Rujukan

Arifin, Kiai Zainul (Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Jadid). *Wawancara*. Probolinggo 22 Maret 2015.

Baedowi, Ahmad et.al. "Menghalau Radikalisasi Kaum Muda: Gagasan dan Aksi", *Jurnal Ma'arif Institute*, Vol. 8, No 1, 2013.

Bahri, Media Zainul. *Satu Tuhan Banyak Agama Pandangan Sufistik Ibnu 'Arabi*, *Rumi*, *dan al-Jili*. Jakarta: Mizan Publika, 2011.

Bruisennen, Martin Van. "Tradisional and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia" dalam Fasrish A Noor (ed.), *Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Coleman, James. *Foundation of Social Theory*. Cambridge: Biknap Press of Harvard University Press: 1990.

Coward, Harold. *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama*, terj. Bosco Carvalo. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony. *Jejak Kafilah*, terj, Akh. Muzakki. Bandung: Mizan, 2007.

Ghazâlî (al), Abû H{âmid. *Mîzân al-'Amal*. t.t.: t.tp., t.th.
Hadzik, Gus Zaki dan Syafi'i, KH. Musta'in. *Wawancara*. Jombang 04 Juni 2015.
Hannan, Nur (Mudir Ma'had Aly Tebuireng). *Wawancara*. Jombang 11 Juni 2015.
Hefner, Robert W. "Islamic School, Sosial Movement, and Democracy in Indonesia", dalam Robert W. Hefner (ed.), *Making Modern Islam Politic of Education in South Asia*. USA: Hawai University Press, 2009.
Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
Knott, Kim. "Insider and Outsider Perspective" dalam Hinnels *Routledge Companion of Religious Studies*. New York: Routledge, 2001.
Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
Maksum, Ali. *Pluralisme dan Multikulturalisme Paradigma Baru Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Malang: Aditya Media Publishing, 2011.
Mannan, KH. Romzi al-Amiri. *Wawancara*. Probolinggo 04 Juni 2015.
Mas'ud, Abdurrahman. "Memahami Agama Damai Dunia Pesantren", Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2007.
Misrawi, Zuhairi. *Al-Qur'ân Kitab Toleransi*, *Inklusivisme*, *Pluralisme*, *dan Multikulturalisme*. Jakarta: Fitrah, 2007
Mulyana, Rohmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2004.
Mun'im DZ, Abdul. "Pergumulan Pesantren dengan Masalah Kebudayaan", dalam Badrus Shaleh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2007.
Munawar-Rahman, Budhy. *Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Peradaban Baru Islam Indonesia* (Jakarta: LSAF-Paramadina, 2010.
Nasr, Sayyed Hossein. *The Heart of Islam: Pesan-pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, terj Nurasiah Fakih Sutan Harahap. Bandung: Mizan, 2003.
Nurhayati, Jamas. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Penyusun, Tim. *Toleransi dalam Pasungan: Pandangan Generasi Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas dan Kepemimpinan Nasional*. Jakarta: SETARA Institute, 2008.

Raharjo, M. Dawam. *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Modern Sociological Theory*, terj, Alimandan. Jakarta: Kencana, 2010.

Sachedina, Abdulaziz. *Beda Tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non Islam*, terj. Satrio Wahono. Jakarta: Serambi, 2004.

Sadri, Mahmoud dan Sadri, Ahmad. "Kata Pengantar" dalam Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2002.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998.

Siradj, Said Aqil. "Pesantren Pendidikan Karakter dan Keutuhan NKRI", dalam Ibi Syatibi dan Lanny Oktavia (eds.), *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta: Renebook, 2014.

Sumartana at al. *Pluralisme*, *Konflik*, *dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Syafi'i, KH. Musta'in (pendidik di Ponpes Tebuireng). *Wawancara*. Jombang 24 April 2015.

Syafi'i, KH. Musta'in dan Hannan, Ustaz Nur. *Wawancara*, Jombang 11 Juni 2015.

Tan, Charlene. *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*. New York: Routledge, 2011.

Tilaar, HAR. *Pendidikan dan Kekuasaan*. Bandung, Rinneka Cipta, 2003.

TM, Fuaduddin. "Diversifikasi Pendidikan Pesantren: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 4, 2007.

Wahid, KH. Shalahuddin (Pengasuh Pesantren Tebuireng). *Wawancara*. Jombang 14 Januari 2015.

Wicaksono, Didik Priyagung (Ketua LPPM IAI Nurul Jadid) dan Hasan, Ustaz Syamsuri (Dekan Fakultas Syariah IAI Nurul Jadid). *Wawancara*. Probolinggo 15 September 2015.

Wicaksono, Didik Priyagung (Ketua LPPM IAI Nurul Jadid). *Wawancara*. Probolinggo 15 September 2015.

-----. *Wawancara*. Jombang 22 Mei 2015.

Zaini, KH. Zuhri (Pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton). *Wawancara*. Probolinggo 21 Maret 2015.